



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2026**

JL. TRIPANDITA NO. 17 MAGETAN  
KODE POS 63319

websiteside : [disperindag.magetan.go.id](http://disperindag.magetan.go.id)

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
BAB V PENUTUP.....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Diterbitkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjadi acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, maupun daerah dengan daerah

Konsekuensinya adalah dituntut adanya paradigma perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan Tindak lanjutnya adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2026. Ini

merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diterapkan dalam perencanaan strategis (Renstra).

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang PeUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); rubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Willis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045;
11. Peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 3 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan selaras dengan maksud dan tujuan Rencana Strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Disperindag;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target – target kinerja Disperindag.
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah:

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Disperindag Tahun 2024 – 2026;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh bidang di Disperindag dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Renstra Disperindag Tahun 2024 – 2026;
3. Menyesuaikan rencana kegiatan dan pendanaan Disperindag tahun 2026.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

<b>SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH</b>		
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1	Latar Belakang	pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
1.2	Landasan Hukum	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah
1.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Renja Perangkat Daerah
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>		

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun n-2 dan perkiraan capaian tahun n-1, dikaitkan dengan target capaian renstra
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah lainnya	Berisikan permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta isu-isu strategis
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dari pengamatan lapangan
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>		
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (pencapaian IKU dan IKD tahun direncanakan)
3.3	Program dan Kegiatan	Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun direncanakan
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>		
	Memberikan informasi program & kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya	
<b>BAB V PENUTUP</b>		
	Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu Juga dicantumkan tanggal, nama Kepala Perangkat Daerah dan stempel	

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tahun 2026 merupakan tahun Ketiga dalam periode Renstra tahun 2024-2026. Oleh karena itu, pada sub bab ini akan diuraikan proyeksi capaian pelaksanaan Renja Tahun 2024, 2025 untuk mengetahui progres capaian hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026. Evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2024 total anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 20.090.017.354,- yang dialokasikan untuk 10 program dan 54 kegiatan yang terdiri dari urusan pilihan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 18.941.045.819,- dengan capaian serapan anggaran sebesar 94.28%. Untuk realisasi tiap kegiatan tercantum dalam tabel T.C 29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Volume	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 ) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>										
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau</b>	<b>75</b>	<b>%</b>		<b>75</b>	<b>69,11</b>	<b>92,15</b>	<b>75</b>	<b>6,25</b>	<b>8,33</b>
<b>3.30.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin</b>	<b>75</b>	<b>%</b>		<b>75</b>	<b>66,92</b>	<b>89,23</b>	<b>75</b>	<b>0,65</b>	<b>0,87</b>
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	Dokumen		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	3	laporan		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
<b>3.30.02.2.02</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG</b>	<b>75</b>	<b>%</b>		<b>75</b>	<b>47,66</b>	<b>63,55</b>	<b>75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3	Dokumen		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
<b>3.30.02.2.03</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<b>Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW</b>	<b>75</b>	<b>%</b>		<b>75</b>	<b>73,68</b>	<b>98,24</b>	<b>75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	3	Dokumen		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan Program(output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Volume	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 ) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
3.30.02.2.03.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	3	dokumen		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
<b>3.30.02.2.05</b>	<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	<b>Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik</b>	<b>75</b>	<b>%</b>		<b>75</b>	<b>37,78</b>	<b>50,38</b>	<b>75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	Dokumen		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
3.30.02.2.05.0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	dokumen		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
<b>3.30.02.2.06</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau</b>	<b>75</b>	<b>%</b>		<b>75</b>	<b>84,17</b>	<b>112,22</b>	<b>75</b>	<b>19,76</b>	<b>26,34</b>
3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	24	Laporan		6	6,00	100,00	6	1,00	16,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Volume	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 ) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	24	Laporan		8	8,00	100,00	1	0,00	0,00
<b>3.30.02.2.07</b>	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>	<b>Persentase jumlah penerbitan Surat Jeterangan Asal</b>	<b>50</b>	<b>%</b>		<b>50</b>	<b>73,56</b>	<b>147,13</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3	Dokumen		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase peningkatan sarana distribusi</b>	<b>85</b>	<b>%</b>		<b>85</b>	<b>93,40</b>	<b>109,89</b>	<b>85</b>	<b>38,19</b>	<b>44,93</b>
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase peningkatan sarana distribusi</b>	<b>85</b>	<b>%</b>		<b>85</b>	<b>92,98</b>	<b>109,39</b>	<b>85</b>	<b>35,22</b>	<b>41,43</b>
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12	Unit		2	2,00	100,00	2	0,00	0,00
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21	Unit		21	21,00	100,00	21	0,00	0,00
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan</b>	<b>85</b>	<b>%</b>		<b>85</b>	<b>97,50</b>	<b>114,70</b>	<b>85</b>	<b>83,57</b>	<b>98,31</b>
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dokumen		3	4,00	133,33	3	1,00	33,33
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>81,90</b>	<b>81,90</b>	<b>100</b>	<b>45,19</b>	<b>45,19</b>
<b>3.30.04.2.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota</b>	<b>75</b>	<b>%</b>		<b>75</b>	<b>77,65</b>	<b>103,53</b>	<b>75</b>	<b>20,21</b>	<b>26,95</b>
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	Laporan		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Volume	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 ) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>86,07</b>	<b>86,07</b>	<b>100</b>	<b>47,47</b>	<b>47,47</b>
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9	Laporan		3	3,00	100,00	3	0,00	0,00
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	156	Laporan		52	52,00	100,00	52	13,00	25,00
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan		4	4,00	100,00	6	6,00	100,00
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis barang yang dipantau</b>	<b>5</b>	<b>Laporan</b>		<b>5</b>	<b>66,94</b>	<b>1.338,89</b>	<b>5</b>	<b>35,22</b>	<b>704,40</b>
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	15	Laporan		3	3,00	100,00	3	3,00	100,00
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pameran</b>	<b>90</b>	<b>%</b>		<b>90</b>	<b>86,13</b>	<b>95,70</b>	<b>90</b>	<b>27,53</b>	<b>30,59</b>
<b>3.30.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pameran</b>	<b>90</b>	<b>%</b>		<b>90</b>	<b>86,13</b>	<b>95,70</b>	<b>90</b>	<b>27,53</b>	<b>30,59</b>
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	36	Pelaku Usaha		15	12,00	80,00	15	0,00	0,00
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15	Pelaku Usaha		6	4,00	66,67	6	6,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Volume	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 ) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera	100	%		100	99,97	99,97	100	115,54	115,54
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera	100	%		100	99,97	99,97	100	115,54	115,54
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	60000	Unit		20000	10677,00	53,39	20000	3.739,00	18,70
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	975	Orang		500	500,00	100,00	500	170,00	34,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80	%		80	82,28	102,85	80	36,58	45,73
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80	%		80	82,28	102,85	80	36,58	45,73
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	UMKM		30	35,00	116,67	30	11,00	36,67
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	65	UMKM		20	70,00	350,00	20	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90	%		90	92,17	102,41	90	57,79	64,21
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90	%		90	92,17	102,41	90	57,79	64,21
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6	Dokumen		2	2,00	100,00	2	2,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Volume	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 ) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12	Dokumen		5	5,00	100,00	5	4,00	80,00
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12	Dokumen		5	5,00	100,00	5	4,00	80,00
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3	Dokumen		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		12	Dokumen		4	4,00	100,00	4	4,00	100,00
<b>3.31.03</b>	<b>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan</b>	<b>90</b>	<b>%</b>		<b>90</b>	<b>92,89</b>	<b>103,22</b>	<b>90</b>	<b>64,99</b>	<b>72,21</b>
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan</b>	<b>90</b>	<b>%</b>		<b>90</b>	<b>92,89</b>	<b>103,22</b>	<b>90</b>	<b>64,99</b>	<b>72,21</b>
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3	Dokumen		1	1,00	100,00	1	1,00	100,00
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA. bagi	3	Dokumen		1	1,00	100,00	1	1,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Volume	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 ) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
3.31.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi</b>	<b>90</b>	<b>%</b>		<b>90</b>	<b>92,98</b>	<b>103,31</b>	<b>90</b>	<b>57,48</b>	<b>63,86</b>
3.31.04.2.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi</b>	<b>90</b>	<b>%</b>		<b>90</b>	<b>92,98</b>	<b>103,31</b>	<b>90</b>	<b>57,48</b>	<b>63,86</b>
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6	Dokumen		1	1,00	100,00	1	1,00	100,00
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3	Dokumen		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
3.31.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag</b>	<b>77,78</b>	<b>Indeks</b>		<b>77,78</b>	<b>81,07</b>	<b>104,24</b>	<b>77,78</b>	<b>46,00</b>	<b>59,14</b>
3.31.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu</b>	<b>39</b>	<b>Dokumen</b>		<b>14</b>	<b>95,51</b>	<b>682,22</b>	<b>14</b>	<b>4,19</b>	<b>29,92</b>
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	Dokumen		7	7,00	100,00	7	3,00	42,86
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Laporan		7	7,00	100,00	7	4,00	57,14
3.31.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>96,63</b>	<b>96,63</b>	<b>100</b>	<b>69,60</b>	<b>69,60</b>
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186	Orang/bulan		62	59,00	95,16	64	0,00	0,00
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan		2	2,00	100,00	2	2,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Volume	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 ) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
<b>3.31.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>26</b>	<b>Dokumen</b>		<b>26</b>	<b>84,85</b>	<b>326,35</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.31.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	6	Dokumen		2	2,00	100,00	2	1,00	50,00
3.31.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	72	Dokumen		24	24,00	100,00	24	18,00	75,00
<b>3.31.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</b>	<b>64</b>	<b>orang</b>		<b>64</b>	<b>76,42</b>	<b>119,40</b>	<b>64</b>	<b>103,00</b>	<b>160,94</b>
3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	186	Orang		62	59,00	95,16	50	64,00	128,00
3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Orang		2	2,00	100,00	2	39,00	1.950,00
<b>3.31.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>97</b>	<b>Paket</b>		<b>97</b>	<b>98,12</b>	<b>101,16</b>	<b>97</b>	<b>68,00</b>	<b>70,10</b>
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket		4	4,00	100,00	4	2,00	50,00
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	Paket		6	6,00	100,00	6	4,00	66,67
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	Paket		3	3,00	100,00	3	3,00	100,00
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket		12	12,00	100,00	12	9,00	75,00
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket		12	12,00	100,00	3	2,00	66,67
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	Dokumen		40	40,00	100,00	40	30,00	75,00
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan		24	24,00	100,00	24	18,00	75,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Volume	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 ) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
<b>3.31.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>180</b>	<b>Laporan</b>		<b>60</b>	<b>90,59</b>	<b>150,99</b>	<b>60</b>	<b>45,00</b>	<b>75,00</b>
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	Laporan		36	36,00	100,00	36	27,00	75,00
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Laporan		12	12,00	100,00	12	9,00	75,00
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan		12	12,00	100,00	12	9,00	75,00
<b>3.31.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>21</b>	<b>Unit</b>		<b>7</b>	<b>97,71</b>	<b>1.395,80</b>	<b>7</b>	<b>4,00</b>	<b>57,14</b>
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit		1	1,00	100,00	1	0,00	0,00
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit		5	7,00	140,00	5	3,00	60,00
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		1	2,00	200,00	1	1,00	100,00
						<b>99,56</b>					<b>54,97</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perindustrian dan perdagangan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan sebagaimana tabel berikut :

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Perdagangan</b>												
1	Nilai Kinerja Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten			24577,3	26240,44	27903,58	29566,73	24577,3		27903,58	29566,73	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			75	75,25	75,5	76	75		75,5	76	
<b>Urusan Perindustrian</b>												
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota			4,50	4,59	4,82	5,30	4,50		4,82	5,3	
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota			12,26	12,34	12,42	12,50	12,26		12,42	12,5	
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota			105586	106663	107751	108850	105586		107751	108850	
4	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota			570,36	574,14	577,92	581,71	570,36		577,92	581,71	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota			398,19	429,2	442,07	445,33	398,19		442,07	445,33	
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor			76,65	76,67	76,69	76,71	76,65		76,69	76,71	
7	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.			76,65	76,67	76,69	76,71	76,65		76,69	76,71	
8	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.			9,96	14,07	18,18	25,64	9,96		18,18	25,64	
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini			1	1	1	1	1		1	1	

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2025 - 2029.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2026 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). dengan skala ordinal sebagai berikut :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah lainnya

Tugas dan fungsi utama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah

1. Era [revolusi industri](#) ke-4 (Industry 4.0) akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya Sumber Daya Manusia karena digantikan oleh mesin atau robot semua serba *Internet of/for Things*, dan masih sangat kecilnya pengetahuan dan kesiapan *industry kita* berinovasi menyesuaikan dengan era industri 4.0
2. Perlunya peningkatan SDM ( pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan termasuk penguasaan iptek ) bagi pengusaha IKM, UKM dan IRT sebagai sarana diversifikasi usaha ekonomi/dalam mengelola usahanya.
3. Masih perlunya Pengembangan Industri kecil sebagai penunjang Pariwisata baik dari kemasan maupun dari factor perijinan produk, yang dapat dikembangkan untuk oleh – oleh khas.
4. Masih rendahnya kemampuan penerapan teknologi industry terutama industry kecil di kabupaten magetan mengakibatkan kurang bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain
5. Pembangunan sentra – sentra ekonomi/penumbuhan usaha baru agar memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengembangkan usahanya.
6. Membuat data yang valid untuk penerima bantuan baik bantuan berupa peralatan supaya tepat sasaran dan tidak terjadi pemasalahan ketika akan memberi bantuan

7. Data base IKM (jumlah, jenis komoditi, potensi kuantitatif, sebaran, dan lain-lain)
8. Masih perlunya Penataan, pengawasan, pengelolaan dan pengembangan kawasan Industri kecil dan menengah utamanya industri unggulan yang dimiliki Kab. Magetan yaitu Industri kecil pengolahan kulit menjadi industri unggulan dan memiliki keterkaitan proses hulu hilir industri, dimana Industri kecil penyamakan kulit sebagai industri hulunya dan industri kecil kerajinan kulit sebagai industri hilirnya.
9. Ipal mengolah Limbah Industri Penyamakan Kulit belum memadai sehingga sangat mencemari dan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup ( Ancaman pencemaran lingkungan dari industri kulit )
10. Pemilihan lokasi realokasi LIK 2 yang masih terkendala pemilihan lokasi dan pembebasan lahan.
11. Fasilitasi kepada IKM dan UKM tentang adanya pameran - pameran, hal ini sangat penting sekali untuk meningkatkan omset penjualan bagi IKM, baik pameran yang diadakan di Kab. Magetan maupun diluar Kab. Magetan
12. Pendampingan IKM untuk dapat masuk ke pasar digital.
13. Data base Pedagang Kaki Lima (jumlah, jenis komoditi, potensi kuantitatif, sebaran, dan lain lain)
14. Penataan pedagang PK5 di tempat sesuai peruntukannya.
15. Masih diperlukannya tata kelola pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern untuk menarik minat konsumen datang belanja di pasar tradisional.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awai RKPD**

RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan tahun 2009-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2024 – 2026, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, social, budaya dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD,

mempertimbangkan sinergisitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkauan aspirasi masyarakat.

Dokumen RKPD Kab. Magetan tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan, menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tabel T-C. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>JUM LAH</b>				<b>20.763.385.254</b>	<b>JUM LAH</b>				<b>20.763.385.254</b>		
	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.668.678.300	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.668.678.300
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75 %	52.696.800	3.30.02 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Outcome: Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	75 %	52.696.800		
	3.30.02.2.01Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin	75 %	5.285.000	3.30.02.2.01Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin	75 %	5.285.000		
Kab. Magetan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1Dokumen	3.325.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1Dokumen	3.325.000		
Kab. Magetan	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Kab. Magetan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1laporan	1.960.000	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Kab. Magetan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1laporan	1.960.000		
	3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	75 %	3.240.500	3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	75 %	3.240.500		
Kab. Magetan	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1Dokumen	3.240.500	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1Dokumen	3.240.500		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	75 %	4.225.500	3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	75 %	4.225.500	
Kab. Magetan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1Dokumen	1955.500	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1Dokumen	1955.500	
Kab. Magetan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Kab. Magetan	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1dokumen	2.270.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Kab. Magetan	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1dokumen	2.270.000	
	3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Pro sentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik	75 %	4.935.000	3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Pro sentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik	75 %	4.935.000	
Kab. Magetan	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Magetan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1Dokumen	1935.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Magetan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1Dokumen	1935.000	
Kab. Magetan	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Kab. Magetan	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1dokumen	3.000.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Kab. Magetan	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1dokumen	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75 %	31210.800	3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75 %	31210.800	
Kab. Magetan	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Laporan	12.582.500	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Laporan	12.582.500	
Kab. Magetan	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1Laporan	18.628.300	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1Laporan	18.628.300	
	3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal	50%	3.800.000	3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal	50%	3.800.000	
Kab. Magetan	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1Dokumen	3.800.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1Dokumen	3.800.000	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase peningkatan sarana distribusi	85%	7.843.956.250	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Outcome: Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien		Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	85,5	7.843.956.250	
	3.30.03.2.01Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase peningkatan sarana distribusi	85%	7.813.125.000	3.30.03.2.01Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase peningkatan sarana distribusi	85%	7.813.125.000	
Kab. Magetan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	7.188.125.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	7.188.125.000	
Kab. Magetan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24 Unit	625.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24 Unit	625.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	85%	30.831.250	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	85%	30.831.250	
Kab. Magetan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	30.831.250	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	30.831.250	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100%	271.539.700	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	271.539.700	
	3.30.04.2.01M enjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota	75%	3.500.000	3.30.04.2.01M enjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota	75%	3.500.000	
Kab. Magetan	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	3.500.000	
	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100%	238.209.700	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100%	238.209.700	
Kab. Magetan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	16.010.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	16.010.000	
Kab. Magetan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	52 Laporan	11.582.500	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	52 Laporan	11.582.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kab. Magetan	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	210.617.200	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	210.617.200	
	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis barang yang dipantau	5 Laporan	29.830.000	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis barang yang dipantau	5 Laporan	29.830.000	
Kab. Magetan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	29.830.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	29.830.000	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pelaksanaan Pameran	90%	43.260.000	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor Outcome: Nilai Ekspor Barang		Nilai Ekspor Barang	1,100,000,000 Rupiah	43.260.000	
	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Pameran	90%	43.260.000	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Pameran	90%	43.260.000	
Kab. Magetan	Pameran Dagang Lokal	Kab. Magetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	18.000.000	Pameran Dagang Lokal	Kab. Magetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	18.000.000	
Kab. Magetan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Magetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 Pelaku Usaha	25.260.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Magetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 Pelaku Usaha	25.260.000	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTTP yang ditera	100%	121.875.000	3.30.06 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Outcome: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	81%	121.875.000	
	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase UTTP yang ditera	100%	121.875.000	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase UTTP yang ditera	100%	121.875.000	
Kab. Magetan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Magetan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	15000 Unit	91.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Magetan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	15000 Unit	91.000.000	
Kab. Magetan	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Magetan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	30.875.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Magetan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	30.875.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80%	335.350.550	3.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Outcome: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	80,5%	335.350.550	
	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80%	335.350.550	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80%	335.350.550	
Kab. Magetan	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah UM KM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UM KM	235.069.200	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah UM KM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UM KM	235.069.200	
Kab. Magetan	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah UM KM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UM KM	100.281.350	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah UM KM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UM KM	100.281.350	
	3.31URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				12.094.706.954	3.31URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				12.094.706.954	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90%	892.070.850	3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Outcome: Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	76,69%	892.070.850	
	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90%	892.070.850	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90%	892.070.850	
Kab. Magetan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	66.375.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	66.375.000	
Kab. Magetan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	397.820.950	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	397.820.950	
Kab. Magetan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	386.484.650	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	386.484.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kab. Magetan	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1Dokumen	30.931.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1Dokumen	30.931.000	
Kab. Magetan	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Magetan		4 Dokumen	10.459.250	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Magetan		4 Dokumen	10.459.250	
	3.3103 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	90%	36.195.300	3.3103 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Outcome: Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	18,18%	36.195.300	
	3.3103.2.01Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	90%	36.195.300	3.3103.2.01Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	90%	36.195.300	
Kab. Magetan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan		1Dokumen	18.664.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan		1Dokumen	18.664.000	
Kab. Magetan	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Magetan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1Dokumen	17.531.300	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Magetan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1Dokumen	17.531.300	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	90%	128.855.550	3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Outcome: Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	8,18%	128.855.550	
	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	90%	128.855.550	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	90%	128.855.550	
Kab. Magetan	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	94.355.550	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	94.355.550	
Kab. Magetan	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	34.500.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	34.500.000	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	77,78 Indeks	11.037.585.254	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Outcome: Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan pada Dinas		Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan	77,80 Indeks	11.037.585.254	
								Persentase Capaian Kinerja Dan Anggaran	95,07		
	X.XX.012.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	49.508.500	X.XX.012.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	49.508.500	
Kab. Magetan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Laporan	32.986.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Laporan	32.986.500	
Kab. Magetan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	16.522.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	16.522.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X.XX.012.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100%	6.735.702.353	X.XX.012.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100%	6.735.702.353	
Kab. Magetan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	6.728.702.353	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	6.728.702.353	
Kab. Magetan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	7.000.000	
	X.XX.012.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	97.450.022	X.XX.012.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	97.450.022	
Kab. Magetan	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1Dokumen	89.701.772	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1Dokumen	89.701.772	
Kab. Magetan	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24 Dokumen	7.748.250	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24 Dokumen	7.748.250	
	X.XX.012.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	64 orang	39.523.700	X.XX.012.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	64 orang	39.523.700	
Kab. Magetan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	8.645.700	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	8.645.700	
Kab. Magetan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30.878.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30.878.000	
	X.XX.012.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97 Paket	268.915.500	X.XX.012.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97 Paket	268.915.500	
Kab. Magetan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.303.850	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.303.850	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kab. Magetan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	66.482.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	66.482.150	
Kab. Magetan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	11.953.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	11.953.800	
Kab. Magetan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.433.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.433.700	
Kab. Magetan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	
Kab. Magetan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	40 Dokumen	33.330.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	40 Dokumen	33.330.000	
Kab. Magetan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	914.12.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	914.12.000	
	X.XX.012.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	3.691.250.679	X.XX.012.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	3.691.250.679	
Kab. Magetan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	280.290.679	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	280.290.679	
Kab. Magetan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.960.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.960.000	
Kab. Magetan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.391.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.391.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X.XX.012.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	7 Unit	155.234.500	X.XX.012.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	7 Unit	155.234.500	
Kab. Magetan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Magetan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1Unit	57.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Magetan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1Unit	57.700.000	
Kab. Magetan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	65.000.000	
Kab. Magetan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Magetan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	32.534.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Magetan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	32.534.500	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tahun 2026 ini program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan.

**Tabel T-C. 32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Desa Kedungpanji Kec. Lembeyan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	Pelatihan Makanan Olahan
2	Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kec. Takeran			Pelatihan Kerajinan Bambu
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Desa Sempol Kec. Maospati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	Pelatihan Batik
4	Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Desa Kembangan Kec. Sukomoro			Pelatihan Menjahit

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

##### 3.3.1 SEKTOR INDUSTRI

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Dalam penyusunan RIPIN 2015-2035, Kementerian Perindustrian telah melibatkan berbagai instansi terkait, KADIN, pelaku industri dan pakar dari beberapa perguruan tinggi.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: 1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; 2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan 3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut: 1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; 3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut: 1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; 2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi; 3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri; 4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); 5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah; 6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah; 7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri; 8. melakukan pembangunan industri hijau; 9. melakukan pembangunan industri strategis; 10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan 11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut: 1. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen); 2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri; 3. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia; 4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional; 5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; 6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan 7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2. Tahap II (2020-2024) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan

berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

#### **A. Arah dan Kebijakan Industri Nasional**

Pemberdayaan Industri meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industri.

Arah Kebijakan dan strategi pembangunan industry dalam rangacangan RPJPN 2025 – 2045. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Penerapan ekonomi hijau dan sirkular;  
Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan sirkular di berbagai sektor industri manufaktur di antaranya di industri pangan modern berbasis SDA dan industri tekstil berkelanjutan
2. Penguatan industry dasar prioritas dan domestic value chain;  
Penguatan industri dasar prioritas untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi kebergantungan impor. Penguatan rantai pasok di dalam negeri (Domestic Value Chain) dan partisipasi dalam GVC, termasuk bagi industri skala kecil dan menengah
3. Peningkatan daya saing SDM dan teknologi;  
Peningkatan daya saing industri menuju ekspansi global melalui perbaikan produktivitas faktor produksi yang di antaranya mencakup ketersediaan energi bersih untuk industri, ketersediaan SDM industri dan lulusan STEAM yang memiliki kompetensi dan produktivitas sesuai kebutuhan industri prioritas, perluasan pemanfaatan teknologi untuk otomasi dan digitalisasi, serta ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri.
4. Hilirisasi industry prioritas;  
Hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis sumber daya alam tambang serta sumber daya alam agro dan maritim (laut) berdasarkan komoditas unggulan wilayah.
5. Peningkatan kompleksitas produk industry;  
Peningkatan kompleksitas produk industri melalui inovasi serta penerapan smart and green technology serta bioteknologi. Pengembangan industri berbasis teknologi menengah dan tinggi prioritas yang dapat mendorong penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas, pengembangan

industri berbasis inovasi dan riset, terutama untuk mendorong ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi

6. Integrasi ekosistem pendukung.

Peningkatan investasi dan ekspansi industri prioritas yang padat karya terampil, berorientasi ekspor, berbasis teknologi menengah dan tinggi, serta diutamakan di luar Jawa. Peningkatan dukungan ekosistem pembiayaan, pajak, riset dan inovasi, serta infrastruktur standarisasi untuk penguatan industri prioritas melalui skema pembiayaan industri nasional, skema insentif pajak kompetitif, berorientasi ekspor dan teknologi tinggi/inovasi yang disesuaikan karakteristik kebutuhan masing-masing sektor industri prioritas

**B. Arah dan Kebijakan Industri Propinsi**

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena kekuatan pasarnya (*market strength*). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan *multi-infrastructure*, *maritime backbone*, dan *global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic* dan *production cost* serta meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Peningkatan Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2024 didorong oleh peningkatan pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan, konstruksi yang merupakan sumber pertumbuhan tertinggi. Selain itu, tingginya mobilitas penduduk mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sektor utama penopang ekonomi Jawa Timur cenderung sama, yaitu didominasi oleh Industri Pengolahan di sekitar angka 30 – 31%, Perdagangan di sekitar angka 18% – 19%, dan Pertanian di sekitar angka 11%. Selama tiga tahun terakhir, kontribusi sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan dan pertanian cenderung mengalami penurunan.

Tabel.3.1 Kontribusi Sektor Utama PDRB Jawa Timur menurut Lapangan Usaha

Kategori	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (TW I)
Industri Pengolahan	30,32	30,68	30,72	30,60	30,54	31,54
Perdagangan	18,49	17,92	18,46	18,67	18,91	19,01
Pertanian	11,36	11,89	11,50	11,11	11,04	9,71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan sentra hulu produksi agro meliputi berbagai sektor seperti pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Program ini didukung dengan pengembangan linkage sentra melalui hub logistik serta pengembangan hilir industri agro dan pasar (mengingat peran perkotaan sebagai pasar konsumen komoditas agro). Selain itu, terdapat program konservasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang menjadi fokus untuk menjaga keberlanjutan produksi. Di samping itu, upaya untuk meningkatkan pasar agribisnis juga tercermin melalui pengembangan Pasar Induk Agribisnis Puspa Agro menjadi Jatim Food Hub. Program ini juga dilengkapi dengan peningkatan infrastruktur pendukung produksi agro, seperti jalan produksi/usaha tani, embung tani, dan daerah serta saluran irigasi. Lokasi indikasi program terfokus pada wilayah selingkar Bromo - Tengger - Semeru (BTS), Selingkar Wilis (termasuk Kelud dan Lawu), Selingkar Ijen, wilayah Gresik-Lamongan-Tuban-Bojonegoro, dan Pulau Madura.

Arah Kebijakan Transformasi

1. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan dan penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
2. Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industry domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
3. Pengembangan ekonomi syariah antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, industri halal, pariwisata halal dan lain-lain.

### **C. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten**

Percepatan pertumbuhan industri di Kabupaten Magetan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan kemampuan sektor Industri untuk menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan masih menjadi tantangan utama dalam proses industrialisasi.

RPIK ini memiliki visi "*Terwujudnya Agroindustri Berwawasan Lingkungan untuk Magetan Lebih Sejahtera*" serta mengusung tiga misi yakni pertama, mewujudkan industrialisasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi; kedua, mewujudkan agroindustry yang berdaya saing global; dan ketiga, mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan.

Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kabupaten Magetan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Meningkatkan investasi di sektor industri;
2. Meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi Magetan;
3. Menurunkan pangsa pasar agroindustri nasional dan internasional;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

### **3.3.2 SEKTOR PERDAGANGAN**

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang pembangunan Indonesia sebagai NKRI dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah, serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi: sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan pariwisata dan ekonomi.

Ketersediaan sarana-prasarana dan kemudahan akses dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan kualitas distribusi logistik di Wilayah Jawa. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya peningkatan efektivitas perdagangan seiring dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor, meningkatnya investasi industri, dan meningkatnya perkembangan daerah. Keunggulan Wilayah Jawa, seperti angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestik yang tumbuh secara cepat, serta kondisi sarana dan prasarana yang lengkap tidak akan berfungsi secara optimal apabila tidak diimbangi dengan pengembangan teknologi industri.

Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai *economic powerhouse* yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi.

#### **A. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan terkait integrasi ekonomi domestik dan global difokuskan pada: (i) penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi; (ii) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif; (iii) penguatan logistik nasional utamanya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menuju logistik 4.0, peningkatan kualitas SDM logistik, penciptaan ekosistem logistik yang efisien, serta penguatan kelembagaan

logistik; (iv) penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi; (v) peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global; (vi) peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi; serta (vii) penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, utamanya di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta Kawasan Afrika.

## **B. ARAH KEBIJAKAN PROPINSI**

Rekomendasi Pembangunan Ekonomi

1. Penyusunan integrasi pembangunan perdagangan, industri dan pertanian yang terintegrasi sebagai upaya hilirisasi pengolahan komoditas strategis melalui konsep agrobisnis/agropolitan.
2. Implementasi pentahelix untuk percepatan aspek penelitian dan pengembangan di setiap Perangkat Daerah untuk menciptakan inovasi pembangunan daerah yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk membuka akses konektivitas antar wilayah sebagai pendorong pengembangan agrobisnis, pariwisata, sentra industri dan perdagangan.
4. Perumusan kebijakan investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang bersifat inklusif, yaitu berdampak pada pemerataan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan pananggulangan kemiskinan.
5. Percepatan penyusunan satu data, khususnya yang terkait dengan data kemiskinan ekstrim, stunting dan pemerlu kesejahteraan lainnya agar intervensi program dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.
6. Mendorong sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan di Jawa Timur agar mampu menjadi faktor pendorong peningkatan Pengeluaran Perkapita masyarakat Jawa Timur yang masih mencapai 11,9 Juta pada Tahun 2022.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan RENSTRA SKPD 2024-2026 serta hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2026 sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah

Sasaran :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan
2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
3. Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 3.2 Target sasaran Renja Disperindag tahun 2026

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah			1.1	PDRB sektor perdagangan	2.747.010,89 Juta Rupiah
				1.2	PDRB sector Industri	1.928.261,61 Juta Rupiah
		1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	1.1.1	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,17%
		2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2.1.1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,202 %
		3	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas	3.1.1	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,80

			Perindustrian dan Perdagangan			
				3.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80

### 1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Dengan memperhatikan pada:

1. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2024 dan 2025;
2. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2024;
3. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakat;
4. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi;
5. Isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra Disperindag tahun 2024-2026.

Kegiatan pada tahun 2026 ini memiliki 10 jumlah program dan 24 jumlah kegiatan dan 54 sub kegiatan. total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya Rp. 20.763.385.254,31

Sedangkan cross cutting eksternal yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja, Evaluasi, Reviu dan Akuntabilitas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Sedangkan untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan Disperindag Tahun 2026 adalah sebagaimana berikut ini :

Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan
3					3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	30				3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	02			3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	02	2.01		3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik
3	30	02	2.02		3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	02	2.03		3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3	30	02	2.03	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
3	30	02	2.03	0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik
3	30	02	2.05		3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
3	30	02	2.05	0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C
3	30	02	2.06		3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
3	30	02	2.07		3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
3	30	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
3	30	03			3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	03	2.01		3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.02		3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	04			3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	04	2.01		3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3	30	04	2.02		3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	30	04	2.03		3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3	30	05			3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	05	2.01		3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
3	30	06			3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	06	2.01		3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3	30	07			3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	30	07	2.01		3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3	31				3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	02			3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	02	2.01		3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
3	31	03			3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3	31	03	2.01		3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
3	31	04			3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	04	2.01		3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
3	31	01			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	31	01	2.01		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	31	01	2.02		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	31	01	2.04		X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
3	31	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
3	31	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
3	31	01	2.05		X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	31	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3	31	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3	31	01	2.06		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	31	01	2.08		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	31	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3	31	01	2.09		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program dan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami penyesuaian karena adanya efisiensi pagu anggaran berdasarkan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Magetan, adapun rumusan program dan kegiatan mengenai total dan rincian kebutuhan dana/ pagu indikatif, secara rinci dituangkan dalam tabel rencana program dan kegiatan pada Tabel (T-C. 33), sebagai berikut:

Tabel T-C. 33  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JUM LAH</b>						20.763.385.254			20.763.385.254
3									
3	30								
3	30	02							
3	30	02	2.01						
3	30	02	2.01	0001					
3	30	02	2.01	0002					
3	30	02	2.02						
3	30	02	2.02	0001					
3	30	02	2.03						
3	30	02	2.03	0002					

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
			4	5	6	7		8	9
3.30.02.2.03.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Kab. Magetan	1dokumen	2.270.000	DAU		1dokumen	2.270.000
3.30.02.2.05	3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik		75 %	4.935.000			75 %	4.935.000
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan	1Dokumen	1935.000	DAU		1Dokumen	1935.000
3.30.02.2.05.0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan	1dokumen	3.000.000	DAU		1dokumen	3.000.000
3.30.02.2.06	3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		75 %	31210.800			75 %	31210.800
3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Magetan	4 Laporan	12.582.500	DAU		4 Laporan	12.582.500
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Magetan	1Laporan	18.628.300	DAU		1Laporan	18.628.300
3.30.02.2.07	3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal		50%	3.800.000			50%	3.800.000
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kab. Magetan	1Dokumen	3.800.000	DAU		1Dokumen	3.800.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	03			3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya		85,5	7.843.956.250			85,6%	7.843.956.250
3	30	03	2.01		3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi		85%	7.813.125.000			85%	7.813.125.000
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	5 Unit	7.188.125.000	DAU		5 Unit	7.188.125.000
3	30	03	2.01	0002	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	24 Unit	625.000.000	DAU		24 Unit	625.000.000
3	30	03	2.02		3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan		85%	30.831.250			85%	30.831.250
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	2 Dokumen	30.831.250	DAU		2 Dokumen	30.831.250
3	30	04			3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		10%	271539.700			10%	271539.700
3	30	04	2.01		3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota		75%	3.500.000			75%	3.500.000
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Magetan	1 Laporan	3.500.000	DAU		1 Laporan	3.500.000
3	30	04	2.02		3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau		100%	238.209.700			100%	238.209.700
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	3 Laporan	16.010.000	DAU		3 Laporan	16.010.000
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Magetan	52 Laporan	11582.500	DAU		52 Laporan	11582.500

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	8 Laporan	210.617.200	DAU		8 Laporan	210.617.200
3.30.04.2.03	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau		5 Laporan	29.830.000			5 Laporan	29.830.000
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Magetan	3 Laporan	29.830.000	DAU		3 Laporan	29.830.000
3.30.05	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor Outcome: Nilai Ekspor Barang	Nilai Ekspor Barang		1,100,000,000 Rupiah	43.260.000			1200,000,000 Rupiah	43.260.000
3.30.05.2.01	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran		90%	43.260.000			90%	43.260.000
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Magetan	10 Pelaku Usaha	18.000.000	DAU		10 Pelaku Usaha	18.000.000
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Magetan	4 Pelaku Usaha	25.260.000	DAU		4 Pelaku Usaha	25.260.000
3.30.06	3.30.06 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Outcome: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen		81%	121.875.000			82%	121.875.000
3.30.06.2.01	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera		100%	121.875.000			100%	121.875.000
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Magetan	15000 Unit	91.000.000	DAU		15000 Unit	91.000.000
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Magetan	250 Orang	30.875.000	DAU		250 Orang	30.875.000
3.30.07	3.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Outcome: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan		80,5%	335.350.550			81%	335.350.550
3.30.07.2.01	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri		80%	335.350.550			80%	335.350.550
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	30 UMKM	235.069.200	DAU		30 UMKM	235.069.200

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UM KM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kab. Magetan	20 UM KM	100.281.350	DAU		20 UM KM	100.281.350
					3.31URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				12.094.706.954				12.094.706.954
3	31	02			3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Outcome: Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri		76,69%	892.070.850			76,71	892.070.850
3	31	02	2.01		3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro		90%	892.070.850			90%	892.070.850
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Magetan	1Dokumen	66.375.000	DAU		1Dokumen	66.375.000
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Magetan	5 Dokumen	397.820.950	DAU		5 Dokumen	397.820.950
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Magetan	4 Dokumen	386.484.650	DAU		4 Dokumen	386.484.650
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Magetan	1Dokumen	30.931.000	DAU		1Dokumen	30.931.000
3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		Kab. Magetan	4 Dokumen	10.459.250	DAU		4 Dokumen	10.459.250
3	31	03			3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Outcome: Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan		18,18%	36.195.300			25,64%	36.195.300
3	31	03	2.01		3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan		90%	36.195.300			90%	36.195.300
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Magetan	1Dokumen	18.664.000	DAU		1Dokumen	18.664.000
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Magetan	1Dokumen	17.531.300	DAU		1Dokumen	17.531.300

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	04			3.3104 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Outcome: Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini		18,18%	128.855.550			25,64%	128.855.550
3	31	04	2.01		3.3104.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi		90%	128.855.550			90%	128.855.550
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Magetan	1Dokumen	94.355.550	DAU		1Dokumen	94.355.550
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Magetan	1Dokumen	34.500.000	DAU		1Dokumen	34.500.000
3	31	01			X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Outcome: Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan		77,80 Indeks	11037.585.254			77,82 Indeks	11037.585.254
						Persentase Capaian Kinerja Dan Anggaran		95,07				95,14	
3	31	01	2.01		X.XX.012.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		14 Dokumen	49.508.500			14 Dokumen	49.508.500
3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	7 Laporan	32.986.500	DAU		7 Laporan	32.986.500
3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	7 Dokumen	16.522.000	DAU		7 Dokumen	16.522.000
3	31	01	2.02		X.XX.012.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah		100%	6.735.702.353			100%	6.735.702.353
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	62 Orang/bulan	6.728.702.353	DAU		62 Orang/bulan	6.728.702.353
3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Magetan	2 Laporan	7.000.000	DAU		2 Laporan	7.000.000
3	31	01	2.04		X.XX.012.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		26 Dokumen	97.450.022			26 Dokumen	97.450.022
3	31	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	1Dokumen	89.701.772	DAU		1Dokumen	89.701.772
3	31	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	24 Dokumen	7.748.250	DAU		24 Dokumen	7.748.250

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	01	2.05		X.XX.012.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur		64 orang	39.523.700			64 orang	39.523.700
3	31	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	50 Orang	8.645.700	DAU		50 Orang	8.645.700
3	31	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	2 Orang	30.878.000	DAU		2 Orang	30.878.000
3	31	01	2.06		X.XX.012.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		97 Paket	268.915.500			97 Paket	268.915.500
3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	4 Paket	25.303.850	DAU		4 Paket	25.303.850
3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	6 Paket	66.482.150	DAU		6 Paket	66.482.150
3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	3 Paket	11.953.800	DAU		3 Paket	11.953.800
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	20.433.700	DAU		12 Paket	20.433.700
3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	20.000.000	DAU		12 Paket	20.000.000
3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	40 Dokumen	33.330.000	DAU		40 Dokumen	33.330.000
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	24 Laporan	91412.000	DAU		24 Laporan	91412.000
3	31	01	2.08		X.XX.012.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60 Laporan	3.691.250.679			60 Laporan	3.691.250.679
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan	36 Laporan	280.290.679	DAU		36 Laporan	280.290.679
3	31	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	19.960.000	DAU		12 Laporan	19.960.000
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	3.391.000.000	DAU		12 Laporan	3.391.000.000
3	31	01	2.09		X.XX.012.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara		7 Unit	155.234.500			7 Unit	155.234.500
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Magetan	1 Unit	57.700.000	DAU		1 Unit	57.700.000
3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan	5 Unit	65.000.000	DAU		5 Unit	65.000.000
3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 Unit	32.534.500	DAU		1 Unit	32.534.500

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan Tahun 2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN  
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>							20.763.385.254,31							17.519.647.460,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						20.763.385.254,31							17.519.647.460,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						8.668.678.300,00							4.284.000.000,00		
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						52.696.800,00						-	136.500.000,00		
		[ Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha ]	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	75	75	75	75	52.696.800,00	-	-	-	-	-	-	136.500.000,00	-	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	-	-	-	5.285.000,00			Metanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening- katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha- aan, mengo- mbangkan industri kreatif serta mengemba- ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas- an Kemiskinan dan Pengur- angan Ketu- mpangan Mengemba- ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem- antapkan p- erekonomia- n daerah yang berkel- anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	3.325.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik														
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				1 laporan	1.960.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	3.240.500,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	3.240.500,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-	-			-	4.225.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan. Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				1 Dokumen	1.955.500,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan. Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik				1 dokumen	2.270.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-			-	4.935.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1.935.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mendorong Penguatan dan Pengembangan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C														
			Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 dokumen	3.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mendorong Penguatan dan Pengembangan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	31.210.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya														
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	12.582.500,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	18.628.300,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Peningkatan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-	-			-	3.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Peningkatan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						7.843.956.250,00						-	3.149.000.000,00	
		[ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien ]	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	85	85	85	85	7.843.956.250,00	-	-	-	-	-	-	3.149.000.000,00	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	undefined	-			undefined undefined	7.813.125.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun infrastruktur strategis untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	2.989.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	7.188.125.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan Infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan Industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n Infrastruktur strategis untuk mengurangi kesenjanga n antar wilayah.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		2.239.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				24 Unit	625.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan Infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan Industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	30.831.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Peningkatan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk menuangkan penanggungan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	30.831.250,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Peningkatan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk menuangkan penanggungan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						271.539.700,00						-	364.500.000,00	
		[ Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ]	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	10	-	10	10	271.539.700,00	-	-	-	-	-	-	364.500.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	undefined	-			undefined undefined	3.500.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	238.209.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mendorong Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	305.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	16.010.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mendorong Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				52 Laporan	11.582.500,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				8 Laporan	210.617.200,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		235.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.830.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM AGRO Men ingkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	53.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				3 Laporan	29.830.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM AGRO Men ingkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		53.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						43.260.000,00						-	84.000.000,00	
		[ Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor ]	Nilai Ekspor Barang	1500000	-	-	1100000	43.260.000,00	-	-	-	-	-	-	84.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	43.260.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berket anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	18.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berket anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Diasiliasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>				4 Pelaku Usaha	25.260.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		39.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						121.875.000,00						-	195.000.000,00	
		[ Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk ]	Persentase penanganan pengaduan konsumen	80	80	80	80	121.875.000,00	-	-	-	-	-	-	195.000.000,00	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	121.875.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	195.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Utang				15000 Unit	91.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berket anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Periyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				250 Orang	30.875.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berket anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
e.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						335.350.550,00						-	355.000.000,00	
		[ Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ]	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	80	80	80	80	335.350.550,00	-	-	-	-	-	-	355.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	335.350.550,00			Metanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berket anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan	-	355.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				30 UMKM	235.069.200,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Metanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berket anjutan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		315.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				20 UMKM	100.281.350,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkeadilan.	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						12.094.706.954,31							13.235.647.460,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA						11.037.585.254,31						-	11.305.647.460,00	
		[ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien ]	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	77,88	77,78	77,78	77,8	11.037.585.254,31	-	-	-	-	-	-	11.305.647.460,00	-
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	49.508.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-	-	84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	32.986.500,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam da erah negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	16.522.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam da erah negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		29.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.735.702.353,31			Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam da erah negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan 6. Menyele nggarakan birokrasi pe merintahan yang efektif, adaptif, dan transparan.	-		6.709.088.081,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				62 Orang/bulan	6.728.702.353,31	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 6. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang efektif, adaptif, dan transparan.	-		6.702.088.681,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	97.450.022,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-	-	165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	89.701.772,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk men ingkatkan nilai tambah di dalam di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				24 Dokumen	7.748.250,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk men ingkatkan nilai tambah di dalam di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	39.523.700,00			Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk men ingkatkan nilai tambah di dalam di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-	-	46.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	8.645.700,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		24.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	30.878.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		22.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	268.915.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-	-	411.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.303.850,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Pembangunan birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		28.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	66.482.150,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Pembangunan birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	11.953.800,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Pembangunan birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		17.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.433.700,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		37.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	33.330.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		59.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	91.412.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		-	-	-	-	-	-	11.037.585.254,31	-	-	-	-	-	-	11.305.647.460,00	-
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		[ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien ]	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	77,88	77,78	77,78	77,8	11.037.585.254,31	-	-	-	-	-	-	11.305.647.460,00	-
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.691.250.679,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-	-	3.699.308.779,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	280.290.679,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meri ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		280.308.779,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.900.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meri ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.391.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meri ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		3.391.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	155.234.500,00			Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-	-	190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	57.700.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertzinannya				5 Unit	65.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Membangu n birokrasi pemerintah an yang pro fessional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	32.534.500,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						892.070.850,00						-	1.695.000.000,00	
		[ Meningkatnya realisasi pembangunan industri ]	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	76.77	-	76.67	76.69	892.070.850,00	-	-	-	-	-	-	1.695.000.000,00	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	892.070.850,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Industri	-	1.695.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	66.375.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Industri		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				5 Dokumen	397.820.950,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Industri		770.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				4 Dokumen	386.484.650,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Industri		780.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	30.931.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Industri		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				4 Dokumen	10.459.250,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Industri		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						36.195.300,00						-	65.000.000,00	
		[ Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian ]	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	52,63	-	14,07	18,18	36.195.300,00	-	-	-	-	-	-	65.000.000,00	-
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						36.195.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA M percepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Pelaku Usaha Industri		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordnasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	18.064.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengemb angingkan industri berbasis sumber daya alam untuk meri ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Industri		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03.2.01.0004		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SiINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	17.531.300,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengemb angingkan industri berbasis sumber daya alam untuk meri ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Industri		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						128.855.550,00						-	170.000.000,00	
		[ Meningkatnya pemanfaatan informasi industri ]	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	52.63	-	14.07	18.18	128.855.550,00	-	-	-	-	-	-	170.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	128.855.550,00			Melanjutka n hilirisasi dan mengemb angsan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Industri	-	170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas)				1 Dokumen	94.355.550,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengemb angsan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berkel anjutan.	Pelaku Usaha Industri		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SiINas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SiNas</i>				1 Dokumen	34.500.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan meng embangkan industri berbasis sumber daya alam untuk men ingkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket mpangan Mengemba ngkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk mem antapkan p erekonomia n daerah yang berket anjutan.	Pelaku Usaha Industri		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
<b>J U M L A H</b>								<b>20.763.385.254,31</b>							<b>17.519.647.460,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting**

Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan teknis dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor industry dan perdagangan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (Stake Holder) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada akhirnya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembet ke bawah sehingga keberpihakan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

#### **5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk tahun dan anggaran 2026 sehingga diperoleh peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.
- b. Seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan wajib menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/ kegiatan yang menemui kendala/ masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

#### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan juga akan digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit kerja/aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Selanjutnya, dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai, akan mengacu kepada indikator kinerja serta target yang tercantum dalam Renja.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selain menjadi relevan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan, Rencana Kerja juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Magetan, 27 November 2025

Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Magetan



SUCIPTO, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660714 199403 1 009